

BAB 4

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisa isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2006-2011) serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang (2011-2016).

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Perekonomian Daerah

4.1.1.1. *Keuangan Daerah*

Beberapa fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan aspek Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

1. **Masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pemerintah pusat.** Hal ini menunjukkan kecenderungan tingginya ketergantungan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pemerintah pusat. Pada sisi lain, akan membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang sangat urgen bagi masyarakat.
2. **Adanya kecenderungan stagnan penerimaan PAD.** Hal ini mencerminkan masih belum optimalnya kinerja SKPD terkait. Oleh

sebab itu diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat, dimana pada satu sisi terjadi peningkatan PAD dan pada sisi lain menghindari semakin meningkatnya beban pajak dan retribusi daerah yang ditanggung masyarakat.

3. **Masih rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah secara total terhadap pendapatan asli daerah.** Hal ini mencerminkan dua hal yaitu belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. **Masih terbatasnya jenis pajak dan retribusi yang dipungut dalam rangka peningkatan PAD.** Masih belum terlihat secara maksimal upaya yang telah dilakukan berkenaan dengan kebijakan diversifikasi pajak dan retribusi daerah. Demikian juga halnya dengan kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
5. **Belum maksimalnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah.** Inventarisir terhadap asset daerah harus dilakukan secara optimal dalam rangka mengidentifikasi potensi PAD yang memungkinkan diperoleh dari pengelolaan asset daerah tersebut.

4.1.1.2. Sumberdaya Ekonomi

1. Belum berkembangnya sektor agroindustri dalam rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas unggulan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Dengan lokasi yang strategis pada kawasan Sijori, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seharusnya lebih dapat memanfaatkan keuntungan lokasi tersebut untuk memproduksi produk-produk agroindustri yang memiliki nilai tambah.
2. Kinerja ekspor yang belum optimal, antara lain disebabkan karena nilai tambah produk ekspor yang masih rendah, masih lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
3. Persentase penduduk miskin yang cenderung meningkat. Terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan dari Rp. 213.056 per bulan meningkat menjadi Rp. 244.160 per bulan. Peningkatan tersebut menunjukkan secara umum terjadinya peningkatan biaya hidup yang terindikasi dari meningkatnya biaya kebutuhan pokok.

4. Tingkat pengangguran masih merupakan permasalahan yang berlangsung hingga saat ini. Disamping persoalan kemampuan daya serap tenaga kerja pada dunia usaha yang ada, juga lebih disebabkan oleh ketidak sesuaian latar belakang pendidik pencari kerja, dan kompetensi yang dimiliki dibandingkan apa yang dibutuhkan dunia usaha.
5. Kurang berkembangnya investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengindikasikan kurangnya daya tarik investor untuk berinvestasi. Lemahnya daya dukung infrastruktur, sistim pelayanan perizinan yang belum standar sehingga berdampak pada ekonomi biaya tinggi serta daya dukung SDM merupakan beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pengembangan investasi di Kabupaten ini.
6. Adanya kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan yang potensi tanaman pangan dan hortikultura ke subsektor perkebunan sawit, sehingga terjadi penurunan luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura.
7. Masih rendahnya produktivitas lahan dan terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanaman.
8. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan dan petani tanaman pangan.
9. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan daerah tetangga dan asing yang masuk ke perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga tidak maksimalnya pengelolaan hasil tangkap serta pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.

11. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarnya.
12. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum semua nelayan memiliki alat penyimpanan ikan yang baik dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.
13. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, cold storage, jenis alat tangkap.
14. Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya *over fishing*, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
15. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
16. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.
17. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah, baik keterampilan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat.
18. Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah pemasaran masih belum lancar sehingga merendahkan bargaining position petani dalam menjual hasil produksinya dan pada sisi lain meningkatkan biaya produksi dalam mendapatkan factor produksi di pasar.
19. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang kurang berkembang. Hal ini berkenaan dengan adanya permasalahan pada SDM (tingkat ketrampilan tenaga kerja, penguasaan teknologi, kemampuan manajerial), akses terhadap permodalan, dan kemampuan perluasan pasar.
20. Peranan lembaga Koperasi/lembaga keuangan mikro yang masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan pendekatan yang kurang tepat dalam pengembangan kelembagaan, dan minimnya inisiatif baru.

4.1.2. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

4.1.2.1. Migas dan Bahan Tambang

1. Informasi dan pengetahuan tentang kandungan dan sebaran sumberdaya alam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terbatas sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi juga masih dalam skala yang terbatas.
2. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia belum memadai dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam secara optimal.
3. Pemanfaatan SDA tidak lestari fungsi lingkungan hidup masih dihadapi yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis.

4.1.2.2. Pertanian

1. Kondisi lahan yang umumnya berada di dataran rendah dengan jenis tanah gambut yang mendominasi sebaran tanah di Tanjung Jabung Timur merupakan lahan marginal yang memerlukan biaya yang besar dan teknik spesifik dalam upaya pengelolaannya.
2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Diantaranya : terbatasnya jalan usahatani untuk mangangkut hasil tanaman pangan dan hortikultura, belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk , pestisida, alat dan mesin pertanian kurangnya pengelolaan tata air.
3. Daya saing ekonomi beberapa produk pertanian Tanaman Pangan yang relatif rendah berpengaruh terhadap minat usaha pertanian masyarakat pada beberapa komoditas, misalnya banyaknya lahan pangan berubah fungsi menjadi lahan perkebunan (menyempitnya lahan pangan).
4. Kondisi fisik lahan dan jaringan infrastruktur yang kurang memadai mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi hasil pertanian. Sehingga posisi tawar petani rendah yang mengakibatkan harga hasil pertanian ditingkat petani rendah sebaliknya harga kebutuhan pokok lainnya tinggi.
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan

6. Kuantitas dan kualitas aparat pemerintah bidang pertanian seperti Penyuluh Lapangan (PPL) dan penyuluh Spesialis (PPS) yang masih terbatas.
7. Keterbatasan anggaran pembangunan sehingga sektor pertanian (pertanian perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan) belum mendapat alokasi dana yang cukup untuk memacu pembangunan pertanian sebagai sektor penggerak ekonomi masyarakat.
8. Rendahnya produktifitas hasil pertanian.

4.1.3. Infrastruktur Daerah

1. Presentase jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat pada jalan kabupaten di kabupaten Tanjung Jabung Timur masih cukup tinggi dan jalan dengan permukaan tanah juga masih mendominasi sehingga aksesibilitas masyarakat menjadi terhambat.
2. Penyebaran jalan dengan kualitas baik dengan permukaan aspal masih belum merata untuk semua kecamatan dan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga masih banyak Desa yang belum menikmati kelancaran transportasi terutama jika musim penghujan.
3. Kondisi fisik kawasan yang didominasi oleh dataran rendah dengan jenis tanah gambut membuat biaya pembangunan infrastruktur menjadi tinggi dan resiko kerusakannya juga lebih tinggi.
4. Fluktuasi debit air sungai selama musim kemarau dan hujan tinggi sehingga menjadi faktor penghambat transportasi sungai.
5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung transportasi yang lain seperti pelabuhan/dermaga untuk transportasi laut/sungai dan jembatan.
6. Fasilitas LLAJ yang masih sangat terbatas
7. Masih banyaknya jembatan bentang besar, menengah dan kecil dengan konstruksi kayu/semi permanen.
8. Masih terbatasnya rasio *electricity* dan penyediaan air bersih.

4.1.4. Kebutuhan Dasar

4.1.4.1. Kesehatan

1. Kualitas sebagian sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu belum standard
2. Jumlah tenaga medis tertentu yang masih terbatas. kualitas tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat masih perlu ditingkatkan.
3. Kepercayaan dan animo masyarakat untuk berobat di puskesmas dan satelitnya masih perlu ditingkatkan antara lain dengan cara pemerataan dan meningkatkan kualitas layanan di setiap unit kesehatan.
4. Kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas masih perlu ditingkatkan.

4.1.4.2. Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain:

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang masih relatif rendah.
2. Belum meratanya sebaran pendidikan di setiap kecamatan
3. Banyak ruang belajar sekolah yang rusak 41,24 % dari total 1.280 ruang kelas SD dan 37,1 % dari total 213 ruang kelas SMP, serta 18,1 % untuk SMA/SMK dari total 149 ruang kelas.
4. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
5. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
6. Sistem Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.

7. Belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

4.1.4.3. Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Kab. Tanjung Jabung Timur belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah maupun budaya nasional yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.
5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

4.1.4.4. Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.
2. Meningkatnya jumlah pemuda yang terlibat dalam jebakan NAPZA dan pergaulan bebas, di sisi lain hal tersebut kurang diikuti dengan upaya-upaya mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya pergaulan bebas tersebut.
3. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
4. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif rendah.
5. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.
6. Masih terbatasnya ruang publik yang layak guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

4.1.5. Tata Pemerintahan

4.1.5.1. Pemerintahan Umum

1. Belum terpadunya sistem peraturan perundang-undangan daerah, hal ini disebabkan oleh **pertama**, pembentukan peraturan daerah (Perda) pada umumnya belum melalui kajian naskah akademik, sehingga berlakunya Perda tidak efektif, bahkan tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi. **Kedua**, pembentukan Perda juga belum didasarkan pada program legislasi daerah (Prolegda). **Ketiga**, pengetahuan dan pemahaman pembentuk Perda yang masih belum memadai, terutama tentang substansi yang diatur. **Keempat**, pemberlakuan Perda justru kurang

dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. **Kelima**, tidak dilakukan evaluasi terhadap pemberlakuan Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.

2. Aparatur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan cenderung belum bersikap sebagai pelaksana pelayanan public. Masyarakatpun terlanjur menganggap Aparatur sebagai pihak yang harus dilayani. Kondisi terbalik ini cenderung menyebabkan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menyebabkan aparatur cenderung melakukan pelanggaran disiplin dan rendahnya kinerja birokrasi dalam melakukan pelayanan publik.
4. Belum optimalnya fungsi PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Walaupun telah terdapat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan perizinan, namun kantor ini belum berfungsi sebagai “pintu terpadu”. Hal ini disebabkan oleh **pertama**, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Tupoksi kantor PTSP. **Kedua**, wewenang yang dimiliki oleh Kantor PTSP baru sebatas wewenang administrative dan koordinatif, bukan wewenang pokok dalam perizinan. Instansi sektoral masih “enggan” menyerahkan wewenang pokoknya kepada KPTSP, karena berkaitan dengan kepentingan “pemasukan”. **Ketiga**, pengaturan perizinan sektoral dalam Perda belum disesuaikan dengan terbentuknya KPTSP.
6. Belum berfungsinya sistem informasi yang akurat, terbuka dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah.

4.1.5.2. Politik

1. Kemampuan dan pengetahuan politik masyarakat masih terbatas pada simbol-simbol fisik, berimplikasi pada kualitas penyelenggaraan perpolitikan dan demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibatnya, walaupun partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi seperti Pemilu sudah cukup tinggi, namun belum dilandasi oleh pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap pilihannya.
2. Partisipasi politik perempuan. Walaupun UU memberikan kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di lembaga legislative. Kenyataan yang ditemui, dominasi laki-laki masih tetap dominan. Hal ini tidak terlepas dari budaya, pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang cenderung memosisikan perempuan sebagai pelengkap dalam kehidupan politik dan demokrasi.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

4.2.1. Isu Strategis Perekonomian

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

1. **Keterbatasan daya dukung infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi, listrik, dan air** guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas, termasuk didalamnya bagi kebutuhan pelaku ekonomi/ investor.
2. **Pengembangan industri hilir untuk sektor dan komoditas unggulan berbasis kompetensi daerah.** Hal ini bertujuan untuk menggerak perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
3. **Peningkatan kualitas sumberdaya manusia berbasis kompetensi daerah yang berorientasi pasar tenaga kerja.** Beberapa sektor ekonomi, seperti pertambangan, perkebunan dan agroindustri, seiring

dengan perkembangannya membutuhkan tenaga kerja profesional. Namun tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar.

4. **Upaya peningkatan investasi** dalam rangka menggerakkan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemampuan keuangan daerah yang terbatas dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asyarakat.
5. Kebijakan Nasional dalam **Pengembangan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil** dapat diarahi menjadi “Kebijakan melihat kelaut” di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan garis pantai 191 Km (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan. Kegiatan perikanan tangkap dan budi daya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis pengembangan kawasan industri, merupakan potensi lainnya yang dapat dikembangkan di daerah ini.
6. **Program *Community Development* (CD) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)** merupakan bentuk kepedulian pihak swasta terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pembangunan ekonomi daerah melalui program kemitraan dan bina lingkungan.
7. **Letak geografis yang sangat strategis dalam kawasan perdagangan ASEAN** dan menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari/ke provinsi lain. Peran Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan akan semakin strategis sejalan dengan dimulainya pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Ujung Jabung.

4.2.1.1. Sumberdaya Ekonomi

1. Belum berkembangnya sektor agroindustri dalam rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas unggulan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Dengan lokasi yang strategis pada kawasan Sijori, Kabupaten Tanjungjabung Timur seharusnya lebih dapat memanfaatkan keuntungan lokasi tersebut untuk memproduksi produk-produk agroindustri yang memiliki nilai tambah.
2. Kinerja ekspor yang belum optimal, antara lain disebabkan karena nilai tambah produk ekspor yang masih rendah, masih lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
3. Persentase penduduk miskin yang cenderung meningkat, walaupun pada sisi lain terjadi penurunan jumlah penduduk secara keseluruhan. Terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan dari Rp 213.056 per bulan meningkat menjadi Rp 244.160 per bulan. Peningkatan tersebut menunjukkan secara umum terjadinya peningkatan biaya hidup yang terindikasi dari meningkatnya biaya kebutuhan pokok.
4. Tingkat pengangguran relatif rendah, sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan penghasilan yang kurang memadai. Kompetensi tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
5. Kurang berkembangnya investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengindikasikan kurangnya daya tarik investor untuk berinvestasi. Lemahnya daya dukung infrastruktur, belum ada Perda yang mengatur tentang kemudahan penanaman modal, masalah perizinan yang belum standar, berdampak pada ekonomi biaya tinggi serta daya dukung SDM merupakan beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Adanya kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan yang potensi tanaman pangan dan hortikultura ke subsektor perkebunan sawit, sehingga terjadi penurunan luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura.
7. Masih rendahnya produktivitas lahan dan terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan saprodi dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanaman, serta kurang optimalnya fungsi tenaga penyuluh pertanian.
8. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan pada nelayan dan petani tanaman pangan.
9. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki teringgal jauh dengan nelayan tetangga dan asing yang masuk ke perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.
11. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarnya.
12. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum semua nelayan memiliki alat penyimpanan ikan yang baik dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.
13. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, cold storage, jenis alat tangkap.
14. Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya *over fishing*, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
15. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
16. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.

17. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah, baik keterampilan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat.
18. Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah pemasaran masih belum lancar sehingga merendahkan bargaining position petani dalam menjual hasil produksinya dan pada sisi lain meningkatkan biaya produksi dalam mendapatkan factor produksi di pasar.
19. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang kurang berkembang. Hal ini berkenaan dengan adanya permasalahan pada SDM (tingkat ketrampilan tenaga kerja, penguasaan teknologi, kemampuan manajerial), akses terhadap permodalan, dan kemampuan perluasan pasar.
20. Peranan lembaga Koperasi/lembaga keuangan mikro yang masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan pendekatan yang kurang tepat dalam pengembangan kelembagaan koperasi.

4.2.2. Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan

4.2.2.1. Bidang Migas dan Pertambangan

1. Azas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan baik secara ekologi, ekonomi dan social menjadi semakin penting untuk masa mendatang
2. Sumberdaya alam berupa migas dan bahan tambang merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui oleh karena itu diperlukan kebijakan yang cermat dalam pengelolaannya.
3. Kebutuhan minyak dan gas bumi serta bahan tambang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pembangunan industri dan kebutuhan lain.
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi gas, minyak bumi dan bahan tambang yang potensial untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah.

5. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk minyak dan gas bumi serta bahan tambang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi pemanfaatan sumberdaya alam.

4.2.2.2. Pembangunan Pertanian

1. Penataan kawasan dan tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diterapkan dengan konsekuen sehingga dapat menjamin pemanfaatan kawasan sesuai dengan potensi dan peruntukannya seperti yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang.
2. Kondisi agroekosistem Tanjung Jabung Timur sangat potensial untuk pengembangan komoditi tanaman pangan. Sehingga dalam kerangka strategis, Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi padi untuk Provinsi Jambi. Sentra produksi ini ditetapkan tidak hanya berdasarkan agroekosistem tetapi juga berdasarkan data bahwa produksi padi dan tanaman pangan di kabupaten Tanjung jabung Timur mendominasi produksi tanaman pangan di Provinsi Jambi.
3. Perkembangan pembangunan sub sektor perkebunan terutama kelapa sawit mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan dimana lahan-lahan yang potensial untuk pengembangan komoditi tanaman pangan terutama padi berubah fungsi menjadi areal penanaman kelapa sawit. Secara ekonomis, pengusahaan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan penanaman tanaman pangan terutama padi. Rata- rata telah terjadi penurunan luas panen padi rata-rata 4,24%, penurunan produksi 5.53 % dan penurunan rata-rata produktifitas sebesar 3.86 % antara tahun 2005 sampai dengan 2010.
4. Perkembangan komoditi tanaman perkebunan di wilayah lain baik di dalam dan di luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengakibatkan penurunan jumlah produksi tanaman pangan sehingga nilai strategis komoditi tanaman pangan terutama padi akan semakin meningkat di masa mendatang.

5. Perlu campur tangan pemerintah berupa pemberian fasilitas, subsidi, kompensasi, dan regulasi serta bantuan langsung baik teknis maupun non teknis kepada petani tanaman pangan. Campur tangan ini diperlukan karena komoditi tanaman pangan terutama padi adalah komoditi strategis sehingga pengembangannya tidak hanya diserahkan kepada mekanisme pasar.
6. Kondisi geografis dan fisik kawasan menjadikan kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan baik perikanan darat maupun laut. Kebutuhan hasil produksi dan olahan industri perikanan akan semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan serta peningkatan kesadaran bahwa ikan merupakan sumber protein yang sehat.
7. Azas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan menjadi semakin penting untuk masa mendatang

4.2.3. Bidang infrastruktur

Isu ini menjadi sangat penting karena pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi prasyarat utama berjalanya proses pembangunan secara baik. Adalah suatu kemustahilan pembangunan akan berjalan dengan baik jika infrastruktur transportasi tidak memadai, listrik dan air tidak tersedia. Untuk itu dalam 5 tahun kedepan ketiga infrastruktur dasar tersebut harus dapat terpenuhi untuk mayoritas masyarakat dan wilayah di Tanjung Jabung Timur. Isu strategis pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas seperti infrastruktur transportasi, listrik, dan air untuk masyarakat luas merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai sampai akhir tahun 2016.
2. Letak geografis Tanjung Jabung Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah pusat pengembangan Batam dan Negara tetangga Singapore dan Malaysia merupakan potensi geografis yang sangat

penting bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah ini dapat berperan sebagai gerbang transportasi Provinsi Jambi khususnya dan Sumatera umumnya ke wilayah tersebut. Untuk berperan secara maksimal maka sarana dan prasarana infrastruktur daerah harus dalam kondisi baik secara kualitas dan kuantitas.

3. Persentase Infrastruktur jalan yang rusak/buruk dalam wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori tinggi yaitu mencapai 41,74 % di tahun 2010. Penyebaran jalan dengan kualitas baik dengan permukaan aspal masih belum merata untuk semua kecamatan dan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga masih banyak Desa yang belum menikmati kelancaran transportasi terutama jika musim penghujan.
4. Rasio jumlah penduduk Tanjung Jabung Timur terhadap panjang jalan masih cukup tinggi yaitu 225,78 yang artinya hampir 226 penduduk untuk setiap 1 km panjang jalan. Sedangkan untuk rasio jalan dalam kondisi baik mencapai 1.095,54.
5. Kondisi topografi dan bentang lahan menyebabkan transportasi sungai dan laut menjadi alat transportasi yang sangat penting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengembangan dan optimalisasi transportasi sungai dan laut harus dibenahi dengan penyiapan infrastruktur pendukung seperti dermaga, pelabuhan, dan sungai yang bisa dilayari dengan baik.
6. Selain pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur dasar tersebut, pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi juga harus ditingkatkan karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.2.4. Kebutuhan Dasar

4.2.4.1. Bidang Kesehatan

Isu strategis dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Status derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah yang ditandai oleh beberapa indikator antara lain; (1) Indeks pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun menempati urutan terakhir dari sebelas Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yaitu 70,51 (tahun 2009); (2) persentase rumah tangga dengan fasilitas air bersih yang masih rendah dan (3) penolong pertama kelahiran oleh tenaga kesehatan baru mencapai 59,18 % (2009).
2. Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan selaras dengan tujuan pembangunan sumberdaya manusia secara global yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) memerlukan upaya yang lebih fokus.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang masih terbatas terutama di perdesaan dan wilayah terpencil.
4. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan mengalami peningkatan tetapi masih perlu upaya dan kerja keras untuk lebih ditingkatkan lagi. sehingga derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

4.2.4.2. Bidang Pendidikan

1. Kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mampu sepenuhnya mendukung pembangunan daerah.
2. Kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang masih rendah sebagai akibat dari keterbatasan, kapasitas dan kompetensi Guru, serta keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung lain seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga dan lain-lain.
3. Kualitas dan penyebaran infrastruktur pendidikan yang kurang memadai terutama di wilayah terpencil dan perdesaan.

4. Minat dan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi masih rendah.
5. Pelaksanaan muatan lokal yang masih bersifat umum dan belum menyentuh langsung terhadap kepentingan daerah masing-masing.
6. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar Kecamatan maupun antara sekolah pada daerah yang sama terutama di daerah perifer, demikian pula penyebaran menurut bidang ilmu tertentu.
7. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.

4.2.5. Tata Pemerintahan

4.2.5.1. Pemerintahan Umum

1. **Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.** Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat
2. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.** Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number* (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi

perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh **belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya**. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.

Di samping permasalahan tersebut di atas, **budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi**. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan semestinya. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

3. **Pelayanan Publik.** Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur **belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi**, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan antar daerah dan global yang semakin ketat.

Para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terkendala dengan berbagai regulasi, system pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.

Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga penanganan pengaduan seperti “Ombudsman Daerah”.

4. **Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.** Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Organisasi daerah (SKPD) yang ada saat ini masih terlalu besar (*heavy structure*). Akibatnya, besarnya biaya rutin, terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum

ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Oleh karena itu perlu perampingan organisasi perangkat daerah, pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah untuk memacu kinerja, peningkatan kompetensi sekaligus pembatasan jumlah PNS tidak lebih dari 5.000 personil pada tahun 2015.

5. **Pengembangan budaya hukum dan HAM.** Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.

Di sisi lain upaya pendidikan Hukum dan HAM serta koordinasi penegakan HAM skala kabupaten, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten masih belum berjalan optimal. Demikian juga dengan kinerja Panpel RANHAM kabupaten.

4.2.5.2. Politik

1. Tingginya angka partisipasi dalam pemilu ternyata tidak menjamin kualitas pemilu, baik pemilu Kepala Daerah maupun legislatif dan eksekutif. Bahkan ada kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat tentang pemilu. Ada anggapan yang keliru bahwa pemilu indentik dengan imbal jasa. Sehingga menimbulkan akses negatif terhadap berbagai kecurangan dalam pemilu. Khusus partisipasi politik perempuan, meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Namun, kondisi ini belum mampu mengubah realitas rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala yang masih dihadapi adalah kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam

melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

2. Sampai saat ini partai politik belum menunjukkan kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai parpol, yaitu agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Selain itu Parpol pun menghadapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti sarana dan prasarana penunjang organisasi, konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi berkurang.
3. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Di sisi lain kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.